

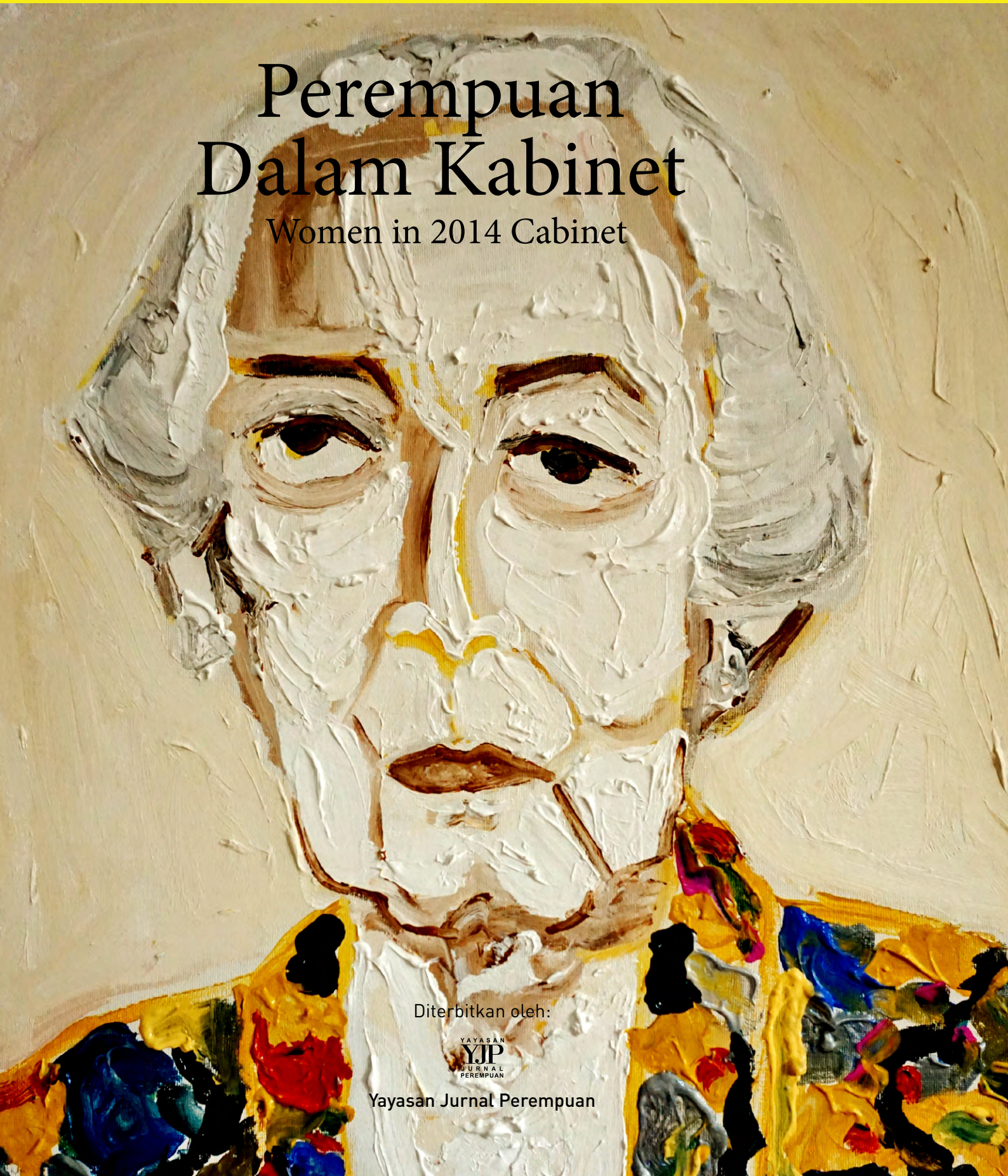
Perempuan Dalam Kabinet

Women in 2014 Cabinet

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

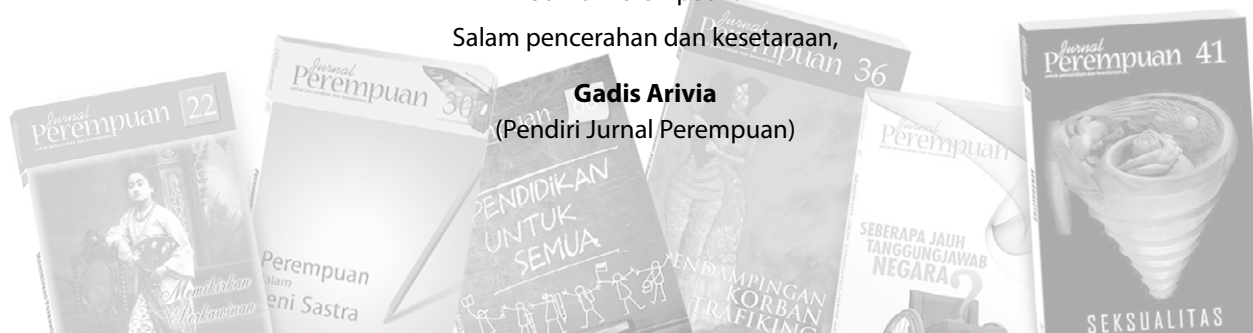
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, November 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan" vii-viii

Artikel / Articles

- *Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan / Political Engineering for Women in Indonesian Governance* 257-264
Philips J. Vermonte
- *Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi / Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy* 265-270
Mariana Amiruddin
- *Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern / Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics* 271-277
Ryan Sugiarto
- *Kehendak Menaklukkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja / Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet* 279-287
Triyono Lukmantoro
- *Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung / Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election* 289-306
Kurniawati Hastuti Dewi
- *Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik / Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics* 307-315
Robert Endi Jaweng
- *Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan / Raison d'etre of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance* 317-326
Dewi Candraningrum

Wawancara / Interview

- *Nafsiah Mboi: "Sikap Tegas Perlu, Tetapi Penguasaan Materi Juga Penting" / Nafsiah Mboi: "Assertiveness is necessary but competence is also crucial"* 327-332
Anita Dhewy

Kata dan Makna / Words and Meanings

333-334

Profil / Profile

- *Yohana Yembise: Perempuan Punya Peran Meningkatkan Ekonomi Keluarga / Yohana Yembise: Women have significant roles in increasing family's incomes"* 335-339
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- *Bagaimana Linda Gumelar Memimpin Kementerian? / How Linda Gumelar leads the Ministry?* 341-343
Nadya Karima Melati

“Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan”

Sirimavo Bandaranaike terpilih menjadi perempuan pertama di dunia yang menjadi Perdana Menteri di Sri Lanka di tahun 1960. Sejak saat itu kurang dari 80 perempuan dari belahan dunia lain mencapai posisi eksekutif baik sebagai menteri, perdana menteri atau presiden. Di tahun 1990 setidaknya ada 26 perempuan yang menduduki posisi eksekutif dalam kabinet-kabinet negara-negara di dunia, yang kemudian angkanya naik menjadi 37 perempuan di tahun 2000—yaitu mengalami kenaikan tiga kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 60-an, 70-an, dan 80-an (UNDP, *Gender Leadership in Executive Report*, 2013). Meskipun demikian masih banyak negara yang harus bekerja keras untuk meruntuhkan “atap kaca” (kerap disebut sebagai *glass ceiling*). Atap kaca benar-benar pecah di Finlandia dimana tiga perempuan berada dalam pucuk pemimpin eksekutif. Jumlah perempuan dalam parlemen Denmark adalah 49 persen tercatat di akhir tahun 2013, demikian juga Swedia sejumlah 42 persen, angka yang sangat tinggi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sedikit retak di Inggris, dengan Margaret Thatcher menjadi contoh perdana menteri perempuan terkuat di jamannya. Dan atap kaca masih benar-benar utuh, dan tak pecah, karena Hillary Clinton gagal menjadi Presiden di Amerika. Kajian *Jurnal Perempuan* 83 kali ini akan mengevaluasi kembali sistem politik, sistem pemerintahan, stereotip perempuan pemimpin, dan pemahaman atas karakteristik dan kepribadian pemimpin dari kaca mata ilmuwan politik, pemerintahan dan sosiolog dalam sumbu paradigma filsafat feminisme.

Representasi perempuan dalam politik sesungguhnya tidak boleh hanya melulu pada persoalan gender (secara esensialis menyangkut “kuota perempuan”), tetapi harus juga merangsek dalam sistem politik dan sistem pemerintahan, dalam

konteks internasional dan nasional atas posisi profesional politisi perempuan. Ini memiliki makna lebih luas lagi, yaitu **pengarusutamaan gender dalam sistem pandangan dunia politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan**. Kajian ini menyadari bahwa sistem pandangan dunia politik kenegaraan, eksekutif dan birokrasi masih menampilkan wajah lama yang melanggengkan ketidakadilan gender. Wajah kabinet baru Indonesia tahun 2014-2019 akan dikaji secara lebih spesifik dari perspektif individual dengan memperhatikan konteks profesi, struktur kekuasaan, dan karakteristik profesi perempuan yang sesungguhnya “berbeda” dari laki-laki, dan pada skala tertentu, atau lebih sering, perempuan dipaksa menjadi “laki-laki” dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*). Tata kelola pemerintahan yang mempromosikan kesetaraan gender menyadari perbedaan karakteristik ini dan tidak memaksakan generalisasi dalam pandangan filosofisnya. Dunia mencatat bahwa perempuan dapat lebih mudah menguasai level parlemen daripada level eksekutif. Padahal level kepresidenan memiliki otoritas lebih tinggi dan lebih independen dalam sistem kekuasaan daripada sistem parlementer. Dalam buku terbaru karya Farida Jalalzai berjudul *Shattered, Cracked or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling Worldwide* (Oxford University Press, 2013), dia menemukan lebih dari 300 perempuan dunia telah menjalankan tugas-tugas eksekutif dan hanya 21 perempuan yang mampu menduduki posisi tertinggi. Kajian ini juga mengungkap hanya 16 perempuan yang bisa mencapai posisi kepresidenan. Dari angka ini masih banyak perempuan yang hanya menjadi bayang-bayang dari pemimpin laki-laki di sampingnya, atau ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau klan keluarganya. Meskipun banyak tantangan yang melawan perempuan naik dalam posisi

kekuasaan kenegaraan, tetapi perempuan dapat menghadapi kesulitan ini, terutama dalam konteks politik yang tidak stabil dimana perempuan memiliki hubungan darah dengan oligarki kekuasaan rezim tertentu. Meskipun ini merugikan perempuan, tetapi paling tidak perempuan mendapatkan pengalaman-pengalamannya yang berbeda dari sebelumnya dimana perempuan merupakan lawan-inferior yang tidak berpengalaman sama sekali dalam hal politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan. Dalam bukunya Jalalzai menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan lebih bersifat konsensual daripada laki-laki, dimana laki-laki mempertahankan kontrol dan kekuasaan (2013: 43). Hal ini juga menjelaskan bagaimana kemudian kepemimpinan perempuan dalam eksekutif lebih bersifat lunak dan kolaboratif. Temuan Jalalzai ini kemudian mengkonfirmasi bagaimana kepemimpinan juga tak lepas dari karakter gender masing-masing individu, sebagai sebuah temuan yang umum, meskipun tidak bisa dipaksakan menjadi untuk "siapa saja" karena sifatnya yang kontekstual.

Beberapa kajian sebelumnya mewartakan bahwa banyak kepemimpinan perempuan dalam posisi eksekutif baik level nasional, provinsi dan kabupaten merupakan kabar gembira, karena menceritakan keberhasilan-keberhasilan yang diraih perempuan pemimpin. Indonesia mencatat Walikota Surabaya Risma, Bupati Kebumen Rustri, meskipun juga mencatat kegagalan terbesar Gubernur Banten Ratu Atut yang terjerat kasus mega korupsi demikian juga Bupati Karanganyar Rina Iriani. Partisipasi politik dan kenegaraan perempuan sebagaimana laki-laki juga mengalami naik-turunnya. Catatan-catatan korupsi juga menjadi pekerjaan tersendiri dalam diskursus kepemimpinan perempuan dalam lingkup eksekutif. Kajian menunjukkan bahwa perempuan

harus berjuang lebih keras dari laki-laki dalam meraih posisi eksekutif, tidak hanya latar belakang pendidikan, lingkaran keluarga, pengaruh keluarga, dan lain-lain, tetapi juga harus berjuang melawan segala "prasangka" bahwa perempuan tidak memiliki "kemampuan asal" (kerap disebut takdir) dalam memimpin. Asia dan Amerika Latin adalah rumah dimana tradisi atas perempuan yang tidak memimpin ini dipelihara. Hubungan darah, situasi tidak stabil, dan transisi demokrasi dalam banyak kasus telah menolong perempuan memasuki tangga paling puncak kekuasaan eksekutif—sebagai janda perdana menteri atau sebagai anak perempuan seorang presiden yang terbunuh, misalnya, kemudian perempuan duduk dalam kursi kekuasaan, kemudian mengenal secara tak sengaja tata kelola pemerintahan. Temuan ini menunjukkan betapa lemahnya perempuan yang menjadi pemimpin berasal dari akar organik, karena dia memang benar-benar mampu dan memiliki kapasitas menjadi pemimpin. Bahkan juga dipercayai, bahwa meskipun perempuan memimpin, dia selalu tak dipercaya akan berhasil memimpin. *Jurnal Perempuan* 83 edisi *Status Perempuan dalam Kabinet* ini akan meneliti dan mengulas bagaimana menjelaskan mekanisme politik bagi perempuan untuk dapat mencapai jaring dalam habitus tata kelola pemerintahan, baik secara filosofis, kesejarahan, paradigmatik dan praktis, terutama bagi politisi perempuan rentan yang berasal dari keluarga tidak stabil secara ekonomi-politik dan tidak masuk dalam lingkaran oligarki politik tertentu atau dapat kita sebut sebagai "politisi perempuan organik". Negara dan partai politik bertanggung-jawab atas para perempuan aktivis politik brilian tersebut dengan kehendak-kehendak politiknya, baik formal via kebijakan dan informal via praktik budaya politik. (Dewi Candraningrum, *Pemimpin Redaksi*).

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Philips J. Vermonte. Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS. Jl. Tanah Abang III No. 23-27

Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Political Engineering for Women in Indonesian Governance

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 257-264, 7 gambar, 3 tabel, 11 daftar pustaka.

The rising number of women in parliament is a vital entry point to involve more women politics. This factor opens discourse, engagement and active participation that can elevate women's political bargain in negotiation room. It is in the long run will affect the embodiment of critical mass which is believed to increase factor of women's representation in policies decision. Mainstreaming gender in governance shall be supported by political engineering, institutional setting, roles of the game, and an open and democratic system. Democratic political setting is the pre-requisite to create equal representation and participation for women and other minorities group in governance politics.

Keywords: women, politics engineering, critical mass, governance.

Peningkatan persentase perempuan dalam parlemen adalah *entry point* bagi keterlibatan yang lebih aktif dan konkrit bagi kelompok perempuan secara keseluruhan. Peningkatan ini akan membuka ruang diskursus dan menguatnya posisi tawar kepentingan kelompok perempuan dengan membentuk *critical mass* yang diyakini penting untuk bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Faktor kultural penting dalam mempengaruhi *politics of presence* dari kelompok perempuan. Perihal pengarusutamaan gender dalam tata kelola ini harus didukung dengan *setting* kelembagaan, yang berwujud pada aturan main, *institutional engineering* dan pembuatan serta penjaminan atas aturan main politik yang lebih terbuka dan demokratis. Setting politik demokratis adalah prasyarat terciptanya representasi dan partisipasi kelompok perempuan secara kuantitatif dan substantif dalam tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: perempuan, rekayasa politik, massa kritis, tata kelola.

Mariana Amiruddin. Komisioner Komnas Perempuan. Jl. Lathuhary No.4B, Menteng, Jakarta 10310. Telp.: (021) 3903963

Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi

Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 265-270, 1 tabel, 3 daftar pustaka.

Indonesia urgently needs national women's machinery, like ministry of women and commission for women. Beijing Platform for Action had been adopted by the fourth conferenc of women in September 1995 giving specific attention to national women's machinery in implementing gender mainstreaming at all levels in national development. This machine coordinates and supports all policies regarding strategic decisions and real actions. In July 2004 ECOSOC adopt resolution on national women's machinery as key actor in bureaucracy reformation. The resolution recommends that national women's machinery is being put at the highest level to invest authority and equal power to fulfill the mandates.

Keywords: national women's machinery, women ministry, commission for

women.

Indonesia masih membutuhkan "*National Women's Machinery*"— seperti institusi berbentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan. Beijing Platform for Action yang diadopsi oleh Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (September 1995) memberikan perhatian khusus tentang pentingnya "mesin nasional" dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan. Hal ini mendefinisikan peran utama mesin nasional berupa pusat kebijakan unit koordinasi dalam pemerintahan yang tugas utamanya adalah: mendukung pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan tujuan strategis yang diusulkan dengan tindakan nyata. Pada bulan Juli 2004, ECOSOC bahkan mengadopsi resolusi ini untuk memperkuat peran "mesin nasional" sebagai aktor kunci dalam mempromosikan pengarusutamaan gender. Komisi dalam konferensi tersebut merekomendasikan agar "mesin nasional" ditempatkan pada tingkat tertinggi pemerintahan dan diinvestasikan dalam bentuk kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi mandat mereka.

Kata Kunci: mesin nasional, Kementerian Perempuan, Komnas Perempuan.

Ryan Sugiarto. Program Magister Sains Psikologi, Universitas Gajah Mada . Jl. Sosio Humaniora Bulaksumur Yogyakarta 55281. Telp. +62 274 550435

Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern

Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 271-277, 12 daftar pustaka.

Genealogy and history of queens in Nusantara had been written in golden ink. Their histories across Nusantara were not only an accumulation of wives or ruler, but also inhibited the magic-realism of modern Indonesian society. However, the minimum or rare documents of Nusantara's women leadership had blurred their real representation and strong leadership. This paper investigates the history, roles, status and profiles of women's leader. This paper aims to support current political situation specifically on the tradition of writing woman's her-stories. From this perspective legitimacy of power from history are taken to support women's leadership in current modern Indonesia state.

Keywords: queen, Nusantara, myth, state.

Sejarah panjang kekuasaan dan kepemimpinan perempuan nusantara mencatat hasil yang gemilang. Sejarah perempuan penguasa tidak hanya menempatkan dirinya sebagai ratu atau penguasa kerajaan, tetapi juga memenuhi ruang kesadaran magis masyarakat melalui mitos. Namun minimnya literasi mengenai peran dan sejarah kuasa perempuan yang ditulis oleh sejarawan, membuat bangsa ini seolah tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Tulisan ini bermaksud mengkaji kuasa perempuan nusantara dan sejarah kekuasaan perempuan Indonesia yang berlangsung berabad silam dan mitos yang hidup hingga saat ini. Tulisan ini diharapkan mampu memberi ruang untuk menengahkan pengalaman perempuan nusantara memimpin negeri. Sekaligus mendorong kemungkinan penulisan sejarah yang berpihak pada perempuan. Sehingga sebagai sebuah bangsa, memiliki kajian yang berpijak pada khasanah perempuan nusantara untuk memberi dasar pada kekuatan politik perempuan hari ini.

Kata kunci: ratu, Nusantara, mitos, negara.

Triyono Lukmantoro. Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang. (Jalan Prof. Soedharto, SH Tembalang), Semarang, Jawa Tengah 50275. Telepon: +62 24 8414513

Kehendak Menaklukkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja

Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 279-287, 25 daftar pustaka.

Media representations of women who have positions as ministers in President Joko Widodo's Kabinet Kerja become phenomenon. On one side, media exposes aspects of successful side of female ministers. Media cited the statement of Presiden Jokowi that there are two "first woman" as appreciation. But, on the other side, media representations have masculinity character. For female minister who has "unique body performance", the exposure of media are so excessive. Media had been trapped in the calculation of news values as reference for gathering news. The news values have been controlled by masculinity discourse that legitimate patriarchal regime of truth.

Keywords: media, representations, woman, masculinity.

Representasi media terhadap kehadiran perempuan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi fenomena tersendiri. Media banyak menyoroti sisi keberhasilan kalangan perempuan menteri. Media mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan ada dua "Perempuan Pertama" untuk memberi apresiasi. Namun, pada sisi yang lain, representasi media menunjukkan watak maskulinitas. Untuk perempuan menteri tertentu yang dianggap memiliki "penampilan tubuh yang unik", maka media memberikan sorotan yang berlebihan. Di sinilah media terjebak dalam nilai berita yang menjadi acuannya sendiri. Padahal nilai berita itu sudah dikontrol oleh wacana maskulinitas yang membenarkan rezim kebenaran patriarki.

Kata kunci: media, representasi, perempuan, maskulinitas

Kurniawati Hastuti Dewi. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jl.Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710. Telp.(021) 5225711, 5251542

Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 289-306, 4 tabel, 44 daftar pustaka.

This paper shows that the role and position of Indonesian women in local governance are improving gradually since the implementation of direct elections in 2005. The "structural opportunities" for women to be elected as local leader have increased under the direct elections. The number of women elected as local leaders has risen significantly during 2005-2014 periods. Female local leaders' profiles are diverse in terms of their socio-political background, individual capital and political parties, reflecting a new typology of female local leaders. The presence of female local leaders does not necessarily mean that they always advocate for women issues in their policy line, as this ideal condition depends on other influential factors. And yet, this paper suggests the declining trend of participation and opportunities of women in local governance as the new Local Government Act No. 23/2014 adopts the election of local government head via the Regional People's Representative Council to replace the earlier mechanism of direct election.

Keywords: women, governance, local direct election.

Tulisan ini menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia semakin membaik sejak diberlakukannya Pilkada langsung tahun 2005. Pilkada langsung telah menyediakan "struktur kesempatan" yang lebih besar kepada perempuan untuk menjadi pemimpin politik di daerah. Jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah meningkat signifikan selama kurun waktu 2005-2014. Profil perempuan pemimpin daerah lebih beragam dari segi latar belakang sosial-politik, modal individu, dan partai pengusung yang memperlihatkan kemunculan tipe-tipe baru perempuan pemimpin daerah. Keberadaan perempuan pemimpin daerah tidak serta merta menjamin kinerja dan pemihakan terhadap berbagai persoalan perempuan di daerah, karena hal ini tergantung pada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Namun demikian, tulisan ini juga menengarai tren kemunduran peluang dan partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan diberlakukannya kembali mekanisme Pilkada melalui DPRD, sebagaimana tercantum dalam UU Pemerintahan Daerah terbaru No. 23/2014.

Kata Kunci: perempuan, tata kelola pemerintahan, Pilkada langsung (Pemilihan Kepala Daerah).

Robert Endi Jaweng. Direktur Eksekutif KPPOD, Jakarta. Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980. Telp.: (62-21) 8378 0642/53

Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik

Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 307-315, 3 tabel, 12 daftar pustaka.

Desentralization and local autonomy marks the shift of power from centre to the locals. In the political transition landscape, the actual cause in Indonesia is the power relations that should investigate further dimension of gender, social, politics, and economy. Within this network and framework, women's leadership are hoped to nurture equality and prosperity for those being othered by development and growth. This paper concludes that executive leadership that promotes gender equality shall, foremost, promote concept of women's leadership which are not only due to inheritance but basic political infrastructure.

Keywords: decentralization, bureaucracy, female local leaders.

Desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya tak sekadar menandai hadirnya momentum baru perubahan tata kelola pemerintahan di aras lokal. Dalam lanskap transisi politik, seperti kasus aktual di Indonesia hari ini, desentralisasi dan otonomi tersebut mesti lebih jauh dan mendasar lagi menjadi struktur perubahan itu sendiri, dan dalam tarikan nafas yang sama membuka kesempatan bagi transformasi struktural dan penataan ulang relasi kuasa (*power-relations*) pada matra gender, sosial, politik, ekonomi. Hanya pada struktur demikian, kepemimpinan perempuan menjadi lebih bermakna, sekaligus menjadi humus bagi tumbuh-mekarnya tokoh-tokoh perempuan di berbagai pelosok negeri untuk mengambil peran historis di daerah. Artikel ini bertolak dari proposisi dasar: meski hari ini muncul sederet tokoh perempuan memegang tampuk kepemimpinan eksekutif, namun mereka belum sepenuhnya melahirkan dan atau dilahirkan dalam ruang transformasi struktural dan tata relasi kuasa yang berubah.

Kata Kunci: desentralisasi, birokrasi, kepala daerah perempuan.

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi *Jurnal Perempuan*.
Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan,
12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

***Raison d'être* Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet
Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola
Pemerintahan**

***Raison d'être* of Mainstreaming Gender in 2014-2019
Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 4, November 2014, hal. 317-326, 2 gambar,
18 daftar pustaka.

This research focuses on the presence of women in the Executive via institutionalism approach that methodologically realize that women's position in public is critically under-represented. Approach being employed is defending women and other minorities groups. This approach assume: 1) existential reason of politics is too masculine and unequally distributed among groups; 2) appreciating informal practice held by minorities groups; 3) committed to mainstreaming equality in supporting groups such as women, diffable groups, LGBT, and ecological justice.

Keywords: Executive, women, minorities, governance.

Kajian ini meletakkan fokus pada kehadiran perempuan dalam eksekutif pemerintahan, yaitu kabinet dengan menggunakan pendekatan institutionalisme feminis yang secara metodologis dan klinis melacak, mencurigai, dan menerangkan bahwa akses dan peran perempuan dalam institusi eksekutif amat terbatas dan berada di bawah rerata adil. Pendekatan ini adalah pendekatan subjektif yang secara aksiologis berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas lain (ras-etnis, kelas sosial politik agama, orientasi seksual, difabel, dan lain-lain). Pendekatan ini memiliki tiga matra keberpihakan: pertama, asumsi eksplisit bahwa peraturan dan praktek yang menjadi *raison d'être* (alasan eksistensial) praktek politik amat maskulin dan mengabarkan ketidaksetaraan relasi kekuasaan, secara spesifik mengkonstruksi (!)iyian dalam kata kunci gender, ras, etnis, agama, dan kelas sosial-ekonomi. Kedua, memberikan penghargaan pada praktek-praktek informal dari proses-proses komunikasi dan tata-kelola politik yang tidak termaktub dalam paradigma modern. Perihal ini secara spesifik menginduk pada praktek-praktek masyarakat adat dan perlindungan ekologis yang erat kaitannya dengan perikehidupan perempuan dan para liyan. Ketiga, komitmen pada pengarusutamaan, pendekatan ini menyadari bahwa dua perihal tersebut tidak akan teratasi tanpa ada komitmen politik atas tindakan-tindakan pengarusutamaan, baik gender, difabel, ekologis, dan lain-lain.

Kata kunci: Eksekutif, perempuan, minoritas, tata kelola.

Kehendak Menaklukkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja

Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet

Triyono Lukmantoro

Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Diponegoro, Semarang
(Jalan Prof. Soedharto, SH Tembalang), Semarang, Jawa Tengah 50275. Telepon:+62 24 8414513

triyonolukmantoro@gmail.com

Naskah Diterima 4 November 2014. Direvisi 10 November 2014. Disetujui: 13 November 2014

Abstract

Media representations of women who have positions as ministers in President Joko Widodo's Kabinet Kerja become phenomenon. On one side, media exposes aspects of successful side of female ministers. Media cited the statement of Presiden Jokowi that there are two "first woman" as appreciation. But, on the other side, media representations have masculinity character. For female minister who has "unique body performance", the exposure of media are so excessive. Media had been trapped in the calculation of news values as reference for gathering news. The news values have been controlled by masculinity discourse that legitimate patriarchal regime of truth.

Keywords: media, representations, woman, masculinity.

Abstrak

Representasi media terhadap kehadiran perempuan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi fenomena tersendiri. Media banyak menyoroti sisi keberhasilan kalangan perempuan menteri. Media mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan ada dua "Perempuan Pertama" untuk memberi apresiasi. Namun, pada sisi yang lain, representasi media menunjukkan watak maskulinitas. Untuk perempuan menteri tertentu yang dianggap memiliki "penampilan tubuh yang unik", maka media memberikan sorotan yang berlebihan. Di sinilah media terjebak dalam nilai berita yang menjadi acuannya sendiri. Padahal nilai berita itu sudah dikontrol oleh wacana maskulinitas yang membenarkan rezim kebenaran patriarki.

Kata kunci: media, representasi, perempuan, maskulinitas

Pendahuluan

Ketika mengumumkan jajaran menteri dari Kabinet Kerja yang telah berhasil disusunnya, Presiden Joko Widodo mengemukakan hal yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan kedudukan perempuan sebagai menteri. Kepada Yohana Susana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diberi predikat oleh Jokowi sebagai "Menteri Perempuan Pertama dari Papua" (*Kompas.com* edisi Minggu, 26 Oktober 2014 | 19:37 WIB). Hal serupa dialamatkan juga kepada Retno Lestari Priansari Marsudi, yang dideskripsikan Jokowi sebagai "Menteri Luar Negeri Perempuan Pertama Indonesia" (*Kompas.com* edisi Minggu, 26 Oktober 2014 | 18:23 WIB). Presiden Jokowi menyebutkan dua menteri dari kabinetnya itu sebagai

"perempuan pertama". Ada apresiasi yang muncul dalam penyebutan itu. Ada pula rasa kekaguman yang hendak digulirkan dari predikat tersebut. Tapi, lebih dari itu semua, terdapat mitos yang semakin ditancapkan dengan keberadaan sebutan "perempuan pertama" itu. Pada Yohana Yembise, mitos tersebut berkaitan dengan daerah Papua yang sangat terpencil dan mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lain di negeri ini. Papua adalah wilayah pedalaman yang mengalami marginalisasi. Melalui perspektif demikian, sebutan "Menteri Perempuan Pertama dari Papua" adalah upaya memitiskan Papua sebagai wilayah yang demikian jauh dari kemajuan pembangunan, namun di situ pula terdapat sosok perempuan yang berprestasi dan berhasil menduduki jabatan sebagai menteri. Dengan begitu, ada dua hal sekaligus yang dikokohkan dalam mitos

itu. Pertama, Papua yang dikenal sebagai wilayah paling ujung Indonesia yang tertinggal. Dan, kedua, sosok perempuan (Yohana Yembise) yang berhasil muncul secara gemilang sebagai menteri. Media massa telah menciptakan cara berpikir bahwa problem lokalitas dan jender berhasil dirobohkan oleh Yohana Yembise melalui tangan Jokowi yang sedang berkuasa.

Apa yang terjadi pada Retno L.P. Marsudi yang disebut sebagai "Menteri Luar Negeri Perempuan Pertama Indonesia" adalah penciptaan mitos pula. Media seakan-akan sekadar mengutip pernyataan Jokowi. Namun, di balik itu, sebenarnya terdapat kuasa yang sedang digulirkan media. Dunia diplomasi selama ini dipandang sebagai jenis pekerjaan bagi kaum pria belaka. Persoalan politik luar negeri yang begitu kompleks hanya bisa ditangani oleh mereka yang berjender maskulin. Terlebih lagi dengan kemunculan isu globalisasi, pemahaman bahwa dunia internasional semakin dipenuhi persoalan-persoalan yang dimuati nilai-nilai maskulinitas, seperti perdagangan bebas atau terorisme internasional, semakin kuat bergaung. Kehadiran Retno menciptakan mitos baru bahwa persoalan-persoalan luar negeri pun bisa diatasi perempuan yang dipercaya duduk sebagai menteri. Tapi, "bintang dari segala sorotan" media terhadap perempuan menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK) justru terarah pada Susi Pudjiastuti. Mengapa bisa terjadi demikian? Tidak mudah bagi kaum perempuan untuk menduduki jabatan menteri. Aneka pemberitaan berbagai media, dari yang bersifat serius sampai sekadar bermain-main, diarahkan kepada mereka tanpa henti. Perhatian terhadap perempuan yang menduduki posisi menteri diperlakukan sedemikian istimewa oleh media. Ada suatu penghargaan yang besar yang ditunjukkan media. Namun, seiring dengan itu, media pun kerap kali menunjukkan kenyinyiran yang luar biasa. Media dalam konteks ini telah menjelma sebagai sosok yang mampu memberikan penilaian sedemikian otoritatif bagi kalangan perempuan yang berkedudukan sebagai pembantu presiden.

Rokok dan Tato Susi! Hiperrealitas

Gejala hiperrealitas ini setidaknya dapat disimak pada kartun editorial *Koran Tempo* (edisi Rabu, 29 Oktober 2014, hal. 32). Di situ digambarkan keberadaan figur perempuan yang sedang merentangkan kedua tangannya. Bulu-bulu matanya panjang. Dandanan di wajahnya tebal. Anting-anting

hitam besar melingkar di gelambir dua telinganya. Syal panjang melingkar menjuntai terkena angin. Perempuan itu menaiki sebuah perahu kecil di laut lepas. Penggambaran semacam ini sebegitu ikonik karena mudah mengingatkan publik pada adegan film *Titanic* yang dibintangi oleh Kate Winslet dan Leonardo Di Caprio. Hanya saja yang membedakan adalah perempuan itu sendirian, menatap riang ke depan. Ikan-ikan berlompatan menunjukkan kelimpahan maritim kita. Namun, penanda yang menjadi luar biasa pemaknaannya adalah di tangan kanan perempuan itu terselip rokok yang sedang mengepulkan asap. Tidak lain perempuan yang sedang dikarikaturkan dalam media itu ialah Susi Pudjiastuti, sang Menteri Kelautan dan Perikanan. Mengapa tampilan fisik Susi begitu ditonjolkan, terutama kebiasaannya dalam menghisap rokok? Apakah perempuan tidak boleh merokok karena pihak yang biasa merokok adalah laki-laki? Tampaknya, urusan kelaziman merokok yang dijalankan Susi itu menjadi hal yang sangat ditonjolkan media. Tentang bagaimana Susi mampu mengatasi hidupnya yang serba susah dan prestasinya dalam membangun perusahaan, agaknya, sulit ditampilkan dalam kartun editorial media. Dalam konteks ini, dimensi visual lebih banyak dimainkan media. Karena apa yang tersajikan secara visual pasti gampang diingat dan mudah pula diasosiasikan kepada sosok tertentu. Itulah sebuah mekanisme media dalam menghadirkan kembali apa yang disebut sebagai realitas sosial. Media selalu berupaya mencari aspek-aspek yang memiliki keunikan. Dan, apa yang disebut keunikan itu sendiri, tentu saja, harus mengikuti sudut pandang media yang didominasi oleh hasrat jurnalis (dan kartunis) yang berjenis kelamin laki-laki. Di situlah maskulinitas ditampilkan dominan untuk menentukan cara pandang.

Memang, tidak selalu Susi ditampilkan sebagai perempuan yang mempunyai kebiasaan merokok dan berbicara apa adanya. Pada berita foto yang ditampilkan oleh *Koran Tempo* (edisi Kamis, 30 Oktober 2014, hal. 2) tertera judul "Aksi Susi". Pada foto itu dideskripsikan bagaimana Susi yang berkonde dan berkebaya itu melakukan serah terima jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dari pejabat lama Sharif Cicip Sutardjo kepada Susi. Apa yang tampil dalam foto itu adalah adegan Susi yang sedang tergelak dengan posisi kepala yang mengarah ke belakang. Sementara itu, Sharif hanya tersenyum dan berjabat tangan. Bahasa non-verbal Susi tampaknya

memuat daya tarik luar biasa bagi media, sehingga dihadirkan sedemikian menonjol. Bukankah ini semua dapat terjadi karena Susi adalah menteri yang berjenis kelamin perempuan? Kalau aksi itu yang melakukan laki-laki menteri, apakah media juga akan memberikan porsi serupa? Bukan berarti media sekadar menghadirkan sisi-sisi “keunikan” yang terdapat pada diri Susi. Media pun menampilkan prestasi-prestasi pada bidang usaha perikanan yang telah dicapai oleh Susi. Pada *Koran Tempo* (edisi Kamis, 30 Oktober 2014, hal. 5) disodorkan tentang kepemilikan Susi terhadap landasan kapal terbang sepanjang satu kilometer. Ketika pesawat mendarat pada malam hari, Susi menghimpun tukang ojek untuk memberikan penerangan. Dihadirkan pula pada berita media itu tentang kantor PT ASI Pudjiastuti yang seluas 3 hektar memiliki tempat pengepakan lobster, simulator pesawat, rumah Susi, tiga bangunan hotel, restoran, taman, dan kolam.

Pada kalangan karyawan muncul penilaian bahwa Susi merupakan sosok yang gampang bergaul dan mudah berbicara dengan para karyawannya. Susi juga dianggap sebagai perempuan yang berani mengambil keputusan, misalnya ketika didapatinya ada truk yang sudah rusak diceburkannya ke laut untuk dijadikan rumpon. Kisah lain ialah Susi memerintahkan kepada anak buahnya untuk membeli lobster. Namun, anak buahnya itu diperintahkannya untuk melepaskan kembali lobster itu ke laut karena, menurut penilaian Susi, lobster tersebut sedang bertelur. Pendapat Susi adalah jika lobster itu dibeli, maka beberapa tahun ke depan hewan tersebut tidak dapat ditemukan lagi. Susi memperkirakan hewan tersebut akan punah. Susi memiliki kalkulasi yang rasional. Beberapa hal yang ditampilkan oleh media itu menunjukkan bahwa Susi memang memiliki kapasitas yang baik dalam perusahaan yang mengelola perikanan dan kelautan. Selain itu, Susi memiliki karakter yang egaliter dengan kalangan pekerja di perusahaannya. Susi biasa turun langsung di tengah-tengah pekerjaan anak buahnya dan serentak dengan itu dia mampu menjalin relasi-relasi sosial yang baik. Itulah sisi atau dimensi personalitas Susi yang harus diapresiasi. Hanya saja, penampilan fisik Susi yang dipandang oleh media tidak memenuhi standar kelaziman, maka Susi lebih dominan ditampilkan sebagai sosok perempuan menteri yang “sangat ajaib”. Media menyajikan figur Susi sebagai tokoh yang sedemikian sensasional.

Penghadiran Kembali Realitas

Apa pun yang ditampilkan oleh media tentang sosok Yohana, Retno, dan Susi bukanlah realitas sosial itu sendiri. Media tidak bisa diposisikan sebagai cermin yang mampu memantulkan secara sempurna kenyataan sosial. Media, selain itu, bukanlah kekuatan politik yang bisa menunjukkan netralitas secara paripurna. Media dipastikan memiliki perhitungan tersendiri yang khas ketika menghadapi peristiwa sosial atau pun sosok-sosok berjender tertentu dalam kancah kemasyarakatan. Terlebih lagi pada saat media dihadapkan pada fenomena sosial politik yang spesifik sebagaimana dapat dilihat pada keterpilihan sejumlah perempuan sebagai menteri pada Kabinet Kerja. Terlalu sedikit media yang menghadirkan pemberitaan yang serius bahwa jumlah menteri perempuan meningkat sebanyak dua kali lipat, dari empat perempuan (pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan Jilid II di era kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi delapan perempuan (dalam era Jokowi-JK).

Media, dengan meminjam pernyataan sejumlah pihak yang dianggap memiliki otoritas, telah mendefinisikan realitas. Ketika media mengutip pernyataan Jokowi tentang kehadiran “perempuan pertama” pada saat itu pula media telah berkedudukan sebagai kekuatan yang mendefinisikan realitas. Hal ini dapat terjadi secara nyaman karena media ialah institusi informasi yang beroperasi dalam tanda-tanda kebahasaan dan serentak dengan itu media pun memproduksi kembali tanda-tanda kebahasaan sebagai berita yang dimaknai khalayak. Menjadi benar apa yang dikemukakan Tony Bennett (dalam Gurevitch, Bennett, Curran, dan Woollacott, *eds.*, 1990: 288) bahwa tanda kebahasaan menata dunia. Dengan demikian, media harus dipandang sebagai “pendefinisi realitas sosial”. Jika dijabarkan lebih lanjut, maka peristiwa-peristiwa tertentu yang dilaporkan media dan cara media memaknai peristiwa tertentu itu seperti layaknya kita memahami dunia. Sehingga, dapat diberikan penegasan, media adalah agen-agen yang menjalankan mediasi. Dalam konteks demikian, apa pun (dan siapa pun) yang dihadirkan oleh media pasti mengemukakan cara pandang tertentu sesuai dengan interpretasi media terhadap peristiwa yang dimaksud. Pada momentum itulah media membentuk dan menstrukturkan kesadaran kita yang tentu saja mempunyai konsekuensi sosial dan politik. Lebih ringkas lagi dapat dikemukakan bahwa media bukanlah terpisah dari realitas sosial (*apart from social reality*) melainkan

salah satu bagian dari realitas sosial (*a part of social reality*).

Media merupakan aktor sosial yang tidak pernah berhenti untuk berbicara dan memberikan komentar terhadap peristiwa di sekelilingnya. Melalui berbagai macam pemberitaannya, media mendefinisikan orang-orang dengan jender dan perilaku yang dianggap unik diberikan penamaan. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, apa yang dijalankan oleh media itu merupakan fenomena memberikan penghargaan dalam wujud melekatkan status tertentu pada seseorang yang dianggap populer (Schaefer, 2007: 139). Yohana adalah "Menteri Perempuan Pertama dari Papua", Retno adalah "Menteri Luar Negeri Perempuan Pertama Indonesia", dan figur Susi karena dianggap memiliki "keajaiban" tersendiri dan karena tidak bisa disebut sebagai "Menteri Perempuan Pertama dalam bidang tertentu", maka media pun lantas menjalankan penelusuran sesuai dengan hasrat maskulinitasnya. Di situlah ditemukan, misalnya, sosok Susi yang apabila berbicara bernada berat seperti laki-laki. Susi juga didapatkan sebegitu bebas merokok sambil memberikan wawancara kepada kalangan jurnalis. Susi dipandang media telah melampaui harkat dan martabat sebagai seorang perempuan, ibu, dan bahkan menteri sebagai pejabat penting negara. Namun, serentak dengan itu, Susi ditampilkan pula oleh media sebagai perempuan pekerja keras karena menjalankan pekerjaannya sebagai pedagang ikan dari level yang paling bawah.

Aspek lain yang juga harus dipahami ialah apa yang didenifisikan oleh media tentang realitas "menteri perempuan pertama" tersebut merupakan sebetuk cara kehadiran kembali realitas. Di situlah media menjalankan representasi, yakni suatu cara menghadirkan lagi kenyataan-kenyataan sosial. Karena tidak ada satu pihak pun yang mampu menetapkan makna, maka kita yang mengkonstruksikan makna dengan menggunakan sistem-sistem representasional, yaitu konsep-konsep dan tanda-tanda. Representasi adalah praktik pemakaian objek-objek material dan efek-efeknya. Tapi, maknanya tidak tergantung pada kualitas tanda, melainkan pada fungsi simboliknya. Tanda itulah yang menyampaikan makna (Hall dalam Hall, *ed.*, 1997: 25-26). Media merupakan agen representasi yang sedemikian sempurna karena bisa menghadirkan realitas tertentu tentang perempuan menteri. Seiring dengan itu, media pun seakan-akan merayakan tentang definisi sosok perempuan menteri tertentu.

Siapa pun yang direpresentasikan oleh media secara otomatis juga didefinisikan oleh media.

Mengapa Yohana tidak direpresentasikan (dan didefinisikan) secara menonjol oleh media dalam statusnya menjadi perempuan pertama Papua yang mendapat predikat sebagai guru besar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai profesor doktor bidang silabus desain dan *material development*? Mengapa Retno tidak direpresentasikan (dan didefinisikan) media sebagai perempuan diplomat yang cemerlang? Kenapa Susi tidak dihadirkan kembali (dan didefinisikan) sebagai pimpinan dari maskapai penerbangan? Itulah pokok persoalan yang disebut sebagai representasi media terhadap perempuan menteri yang terdapat dalam masa rezim kepemimpinan Jokowi-JK. Pemberitaan tentang tiga perempuan menteri itu adalah contoh bagaimana media menjalankan politik representasi dan, dengan demikian, siasat mendefinisikan tentang realitas perempuan menteri.

Namun, mengapa media sebegitu "bersemangat" menampilkan Susi dibanding dengan Yohana atau Retno? Sebenarnya, beberapa perempuan menteri yang lain juga diberitakan oleh media. Artinya adalah perempuan-perempuan menteri yang lain juga mendapatkan sorotan sekalipun tidak sebesar Susi. Media pasti menyoroti figur Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada kaitan dengan ibunya, Megawati Soekarnoputri. Ada kecurigaan besar bahwa Puan dapat masuk dalam jajaran kabinet karena tidak terlepas dari campur tangan Megawati. Hal lain yang menunjukkan sinisme yang digulirkan media ialah pada sebuah pemberitaan dideskripsikan bahwa "Puan Maharani ingin Dipanggil 'Ibu Menko'" (*Republika Online* edisi Selasa, 28 Oktober 2014, 16:31 WIB). Padahal, apa yang dimaksudkan di situ adalah Puan menyatakan diri sebagai menteri yang usianya paling muda. Padahal, ada anggapan bahwa kalau masih muda, maka tidak mampu berprestasi. Di situ Puan menghendaki agar pada acara-acara resmi dia dipanggil sebagai "Ibu Menko".

Sosok perempuan menteri lain yang diidentikkan dengan kekuasaan Megawati adalah Rini Mariani Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jokowi menyebutnya sebagai menteri yang tidak hanya "cepat, namun supercepat dan lincah" dalam bekerja. Tapi, Rini pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kaitan dengan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(BLBI) pada bulan Juni 2013 (*Bisnis.com* edisi Minggu, 26 Oktober 2014, 17:53 WIB). Media juga mengulas Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan, sebagai sosok yang bisa menunjukkan prestasi tertinggi dalam birokrasi (*Republika.co.id* edisi Sunday, 26 October 2014, 21:12 WIB). Sosok Khofifah Indar Parawansa digambarkan media pada kondisi meneteskan air mata ketika dipanggil Jokowi untuk menduduki jabatan Menteri Sosial. Khofifah menyatakan ingin segera membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kaum difabel dan kaum gelandangan (*Kompas.com* edisi Senin, 27 Oktober 2014 | 10:11 WIB). Perempuan menteri yang paling sedikit mendapatkan sorotan dari media adalah Nila Djuwita Moeloek. Media, dengan merujuk pernyataan Presiden Jokowi, menyebutnya sebagai “senior yang sangat berpengalaman” (*Kompas.com* edisi Minggu, 26 Oktober 2014 | 18:56 WIB). Kesengajaan media untuk tidak terlalu banyak menyoroti Nurbaya, Parawansa, dan Moeloek jelas merupakan politik representasi yang khas dalam pertautannya dengan dunia industri informasi. Namun, bukan berarti media tidak mampu berperan sebagai pendefinisian realitas sosial. Media tetap bisa melakukan pendefinisian terhadap perempuan menteri tersebut dengan tetap memperhatikan aspek-aspek representasi secara cermat.

Setidaknya, terdapat empat persoalan utama yang harus dibahas ketika media melakukan representasi sebagaimana dikemukakan Croteau dan Hoynes (2000: 194-196). Pertama, representasi pada dasarnya adalah proses seleksi (pemilihan) terhadap aspek-aspek realitas. Dengan demikian, setiap representasi pasti menonjolkan aspek realitas tertentu dan serentak dengan itu mengabaikan aspek realitas lainnya. Kedua, biasanya media memang tidak berupaya untuk mencerminkan dunia yang “nyata”. Hal ini terutama berkaitan dengan persoalan waktu dan sumberdaya yang tersedia. Ketiga, pengertian tentang yang “nyata” itu sendiri masih menjadi persoalan bagi media. Dalam kaitan ini, pernyataan dari penganut konstruksionisme dapat dirujuk bahwa pada prinsipnya realitas itu memiliki multi-aspek (*multifaceted*). Pada saat media melakukan representasi pasti ada komponen realitas yang dilibatkan (*included*) dan bersamaan dengan itu ada pula komponen realitas sosial yang disingkirkan (*excluded*). Keempat, memang tidak ada kewajiban bagi media untuk mencerminkan realitas. Bahkan, untuk beberapa orang, media merupakan pelarian dari realitas sosial. Jadi, bagaimanapun “nyatanya”

apa yang ditampilkan media sudah tidak relevan lagi bagi sebagian khalayak. Apakah yang dihadirkan media sekadar main-main ataukah justru serius bukan lagi problematika yang harus dipilih secara hitam-putih. Antara permainan dan keseriusan yang ditampilkan media terlalu sulit untuk dibedakan.

Demikian pula, ketika media menghadirkan sosok perempuan menteri tertentu dengan predikat dan nama-nama tertentu tidak lain merupakan upaya media untuk menonjolkan aspek realitas tertentu. Serentak dengan itu, media pun menjalankan penenggelaman terhadap realitas tertentu yang dimiliki oleh sang perempuan menteri. Dalam representasi media, hal yang terjadi ialah ketika ada bagian komponen realitas dari sang perempuan menteri yang dianggap menarik oleh media, maka bagian itulah yang terus-menerus akan disoroti dan menjadi kecenderungan pemberitaan media. Sekalipun seorang perempuan menteri memiliki prestasi yang bagus, namun kalau hal itu menjadi bagian yang ditenggelamkan media, maka perempuan menteri itu cuma dipandang sebagai sosok yang biasa saja. Perempuan itu memang layak dijadikan menteri karena mempunyai kompetensi atau keahlian untuk dipilih. Itu saja. Tidak ada pendar-endar sensasi yang serba menimbulkan kehebohan bagi media dan sebagian besar khalayak yang akan mengkonsumsi pemberitaan.

Jebakan Nilai Berita

Dalam domain representasi media yang mengacu dan sedemikian patuh secara ketat pada hukum-hukum jurnalisme, berlakulah dogma: “setiap berita berasal dari fakta, namun tidak setiap fakta layak dijadikan berita”. Hanya fakta-fakta tertentu yang memenuhi nilai-nilai berita (*news values*) yang dapat dihadirkan di hadapan khalayak. Lebih tegas lagi dapat dikemukakan bahwa apa yang disebut sebagai nilai berita adalah nilai jual. Setiap fakta, dengan demikian, tidak selalu layak dijual. Mengikuti logika tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa tidak semua perempuan menteri layak dijadikan berita. Atau, kalau pun mereka dapat dijadikan berita harus mengikuti kriteria yang terdapat dalam *news values* sebagai nama lain dari nilai jual bagi konsumen media. Di sinilah menjadi dapat dimengerti mengapa ada perempuan menteri yang terus-menerus menjadi sorotan media. Sebaliknya, ada pula perempuan menteri yang terkesan hanya “numpang lewat” dalam berbagai pemberitaan media. Setidaknya, dalam jurnalisme terdapat tujuh nilai berita yang

selalu mendapatkan perhatian, yaitu *impact*, *timeliness*, *proximity*, *conflict*, *currency*, *novelty*, dan *relativity* (Burns, 2002: 51-53). Penjelasan dari masing-masing nilai berita adalah seperti berikut ini: *Impact* dapat diartikan sebagai dampak peristiwa yang diberitakan terhadap kehidupan masyarakat. *Timeliness* mengacu pada aktualitas atau kebaruan sebuah peristiwa. *Proximity* merupakan aspek kedekatan peristiwa dengan lokasi (maupun budaya) khalayak. *Conflict* berarti kontroversi atau pertikaian yang melibatkan dua pihak atau lebih. *Novelty* dapat dimaknai sebagai sesuatu yang baru, berbeda, menarik, dan mampu menampilkan keunikan. Dan, *relativity* merujuk pada nilai berita yang sedemikian kompleks dan subjektif karena harus memperhatikan keterkaitan terhadap reaksi yang timbul dari masyarakat. Suatu peristiwa tertentu mungkin sangat pantas diberitakan karena memiliki nilai jual tinggi. Tapi, kalau hal itu menimbulkan risiko yang justru mampu menggoncangkan kehidupan masyarakat, maka berita-berita semacam itu sengaja akan disortir dan bahkan dilynapkan.

Dalam kaitan dengan pemberitaan terhadap para perempuan menteri, maka tampak sekali media mengalami jebakan nilai berita. Media tidak leluasa bergerak justru dikarenakan oleh aturan main yang diterapkannya sendiri. Dalam ruang-waktu pemberitaan semacam ini dapat diketahui ketika perempuan-perempuan menteri itu dipandang media belum dikenal publik, maka yang dioperasikan media ialah mencari dan terus menelusuri kehidupan mereka yang dapat dikaitkan dengan nama populer dari tokoh tertentu. Di situlah, misalnya, media menghadirkan Puan Maharani selalu terhubung dengan Megawati. Selain itu, media akan melakukan penjelajahan terhadap hal-hal yang dievaluasi sebagai perilaku yang unik, aneh, dan luar biasa dalam tubuh dan perilaku perempuan menteri itu. Itulah yang disebut sebagai *novelty* dalam nilai berita. Nama lain dari *novelty* adalah keganjilan (*oddity*), sesuatu yang tidak lazim. Potter (2006) menyitir sebuah mantera abadi dalam jurnalisme untuk merumuskan apa yang disebut sebagai keanehan itu: "Jika ada anjing menggigit orang, bukanlah berita. Tapi, jika ada orang menggigit anjing, itulah berita!" Sesuatu yang luar biasa, tidak lazim, di luar harapan, dan sungguh-sungguh mengejutkan pastilah akan mendatangkan rasa ingin tahu bagi khalayak. Tapi, kalau sesuatu itu tidak lain adalah seorang perempuan dan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai seorang menteri, maka nilai berita yang memuat hal-hal *extraordinary* ditampilkan

begitu hebat dalam media. Di sinilah Susi Pudjiastuti mendapatkan momentum yang luar biasa, bahkan ada kesan media mengalami histeria ketika memberitakan dirinya. Dalam rentang waktu hampir seminggu sejak Kabinet Kerja diumumkan Presiden Jokowi pada Ahad, 26 Oktober 2014, Susi menjadi sorotan media. Prestasinya dan perjuangan hidupnya, bahkan kisah-kisah cintanya, memang ditampilkan media bagai sebuah pentas melodrama. Namun, tentu saja, sisi yang paling mendapatkan porsi paling besar dari media adalah tampilan fisik dan tindakan-tindakannya. Sorotan tajam media demikian menghujam pada kebertubuhan Susi. Sebagai contoh bagaimana media secara lekat memperkenalkan siapa Susi adalah berita berjudul "Bisnis dan Gaya Eksentrik Susi Pudjiastuti" (*Kompas.com* edisi Senin, 27 Oktober 2014 | 15:12 WIB). Tidak cukup hanya merekatkan kata yang telah mengandung makna konotatif di luar kelaziman, aneh, dan unik pada judul berita, melainkan penggambaran mengenai profil Susi ditampilkan dalam dua alinea awal pada berita tersebut, yakni:

Gayanya yang eksentrik, bicaranya ceplas-ceplos. Selain nada suaranya yang berat, layaknya kaum adam, tak jarang wanita ini juga menghisap sebatang rokok filter membuat kesan 'angker' dengan orang yang berhadapan di depannya. Ditambah gambar tato di beberapa bagian tubuh serta kerut di wajah wanita ini mungkin bisa menggambarkan betapa keras jalur hidup yang ditempuhnya.

Tampilan tubuh yang begitu unik dan aneh menurut media itulah yang selalu dilekatkan pada Susi. Teras berita (*lead*) tersebut sudah cukup menunjukkan betapa kebertubuhan menjadi begitu penting bagi media yang sudah dipenuhi dengan hasrat maskulinitas. Bahkan, lebih dari itu semua, *Majalah Detik* (edisi 3-9 November 2014) sampai harus membuat sebuah laporan utama, sebetuk *cover story*, bertajuk *Hikayat Menteri Susi*. Pada sampul depan majalah itu ditampilkan secara ikonik, yang lagi-lagi mengapropriasi sebuah film, bahwa Susi sedang duduk menyilangkan kaki layaknya Sharon Stone dalam film *Basic Instinct*, sang terdakwa yang justru memiliki pesona tubuh luar biasa. Pada deskripsi ini Susi memang tidak ditampilkan sedang merokok atau rokok yang mengepul asap berada di sela-sela jarinya. Sampul majalah itu melukiskan tentang kaki sebelah kanan depan Susi yang bertato panjang.

Semua yang bertautan dengan keunikan, ketidaklaziman, atau keluarbiasaan dari Susi dijadikan beberapa laporan pada rubrik "Fokus", seperti "Telepon Mega Sebelum ke Istana", "Dongeng Tato Putri Pak Haji", "Tiga Kisah Cinta Ibu Menteri", "Gaya Bisnis Aneh Susi", serta satu wawancara yang judulnya diambilkan dari pernyataan Susi sendiri: "Kata Pak Jokowi, Negeri Ini Butuh Orang Gila Seperti Saya".

Tato menjadi hal yang menarik dalam laporan majalah itu, hingga secara berani (lebih tepat nekad!), *Majalah Detik* menulis seperti ini: "Gambar hewan yang melambangkan kemujuran itu terpampang jelas di kakinya. Kini ia menjadi satu-satunya anggota Kabinet Kerja Jokowi yang memiliki tato". Bagaimana kesimpulan itu dapat ditarik dengan demikian gampang hanya karena Susi secara terbuka memperlihatkan tatonya? Apakah *Majalah Detik* telah memeriksa seluruh tubuh menteri lainnya, yang berjumlah 33 orang baik laki-laki maupun perempuan, bahwa memang tidak ada tato di tubuh mereka? Mengapa kalau Susi bertato justru media yang sebegitu kalang kabut? Itulah yang disebut sebagai jebakan nilai berita karena media sedemikian mengalami histeria untuk menampilkan orang dari aspek keunikan, ketidakwajaran, dan keluarbiasaan. Aspek-aspek prestasi yang dimiliki oleh perempuan menteri kurang menimbulkan selera bagi media untuk menjalankan liputan terhadapnya. Kebertubuhan telah menjadi nilai berita dalam konteks ini.

Dalam kasus pemberitaan Susi, media begitu bersemangat untuk menampilkan perempuan menteri yang demikian unik akibat terjatuh dalam dogma "Wow Effect" yang terdapat dalam industri media. Pada kelengkapan pemberitaan media biasanya terdapat aturan 5W+1H (*Who, What, When, Where, Why, dan How*). Satu lagi yang kerap kali dipakai media untuk menjual berita-berita adalah "Wow", sesuatu yang unik, aneh, dan mengejutkan. Intinya adalah: sensasional. Dan, semua syarat itu terdapat pada diri Susi Pudjiastuti. Tapi, pada media lain (*Koran Tempo* edisi Sabtu, 1 November 2014), Susi ditampilkan dalam sosok yang tidak lagi memancarkan aura sensasionalisme, melainkan nasionalisme. Dengan gaya pemberitaan tabloid, media itu menghadirkan Susi sebagai perempuan yang sedang membawa lobster amat besar dalam kedua tangannya. Judul berita itu adalah "Susi Kecewa Ikan Indonesia diolah Negara Lain". Ada spirit kebangsaan yang terpancar dalam representasi

media tentang profil Susi. Tato, dan segala keunikan Susi, agaknya, mulai diganti media dengan representasi tentang bekerja dengan sebaik-baiknya bagi Indonesia.

Rezim Kebenaran

Persoalan yang harus dijawab adalah mengapa media kurang menunjukkan "greget" ketika merepresentasikan figur perempuan menteri sebagai sosok yang memiliki prestasi yang begitu mengagumkan, namun pada sisi lain justru media lebih senang membuat kehebohan tentang aspek-aspek kebertubuhannya yang dianggap tidak lazim? Representasi bukan sekadar perkara menghadirkan kembali realitas secara akurat atau tidak. Representasi media memang mengacu pada nilai-nilai berita yang telah menjadi hukum besi dan, dengan demikian, harus dipatuhi. Aspek lain dalam representasi media adalah apa yang dinamakan sebagai politik representasi (*politics of representation*). Dalam bidang ini, sebagaimana dikemukakan oleh Webb (2009: 14), politik representasi dapat dibaca sebagai bagaimana media memilih, menghargai, dan mengorganisasikan objek-objek, gagasan-gagasan, dan berbagai makna. Cara media merepresentasikan sosok seorang perempuan menteri tertentu dalam tampilan yang dianggap paling istimewa adalah suatu pilihan dalam ranah politik representasi itu.

Artinya adalah representasi sebagai suatu politik tidak sekadar berhenti pada teknik bagaimana realitas tentang kalangan perempuan menteri ditampilkan, tetapi yang jauh lebih penting adalah mengapa mereka dihadirkan kembali ke hadapan khalayak seperti itu. Tepatlah apa yang dikemukakan Hartley (2002), jika representasi media dipertimbangkan, hal yang lebih bermanfaat untuk diperbincangkan adalah wacana (*discourse*) yang mendukung penggambaran tertentu tersebut. Jadi, kalau ada perempuan menteri lebih banyak direpresentasikan oleh media dalam eksotika tubuh dan gerak-gerik badannya, maka pasti ada wacana yang mengaturnya. Dalam hal ini, wacana memang berarti pernyataan atau perbincangan. Hanya saja wacana, ungkap Mills mengutip pendapat Pecheux (1997: 11-15), tidak berada dalam wilayah yang kosong atau terisolasi. Wacana terjadi dalam dialog, dan yang lebih sering lagi adalah relasi yang saling berlawanan dan berposisi. Dalam wacana tersebut ada praktik-praktik penyingkiran (*exclusion*) dengan mengikuti prosedur-prosedur yang spesifik. Hal lain yang juga sangat penting adalah wacana menstrukturkan

pemahaman kita tentang realitas dan penyebutan tentang identitas kita.

Wacana dapat ditelusuri secara tepat dalam rezim kebenaran (*regime of truth*) yang berlaku dalam masyarakat. Rezim kebenaran, tegas Foucault (1980: 131), selalu terdapat dalam setiap masyarakat. Inilah yang dinamakan sebagai politik umum kebenaran. Pada wilayah itu, terdapat tipe-tipe wacana yang diterima dan berfungsi sebagai benar adanya. Dalam rezim kebenaran terdapat pula mekanisme-mekanisme dan instansi-instansi yang memungkinkan seseorang untuk membedakan pernyataan yang salah dan benar. Itulah perangkat untuk memberikan sanksi bagi yang dianggap bersalah. Dengan demikian, mengikuti gagasan Foucault, dalam wilayah itu terdapat pula pernyataan-pernyataan atau berbagai penggambaran secara visual yang dianggap pantas dan tidak pantas. Siapa yang dianggap pantas akan mendapatkan pujian. Dan, sebaliknya, siapa pun yang tidak pantas akan mendapatkan hukuman atau makian.

Mengikuti pemikiran Foucault, sebagaimana diuraikan oleh Foss, Foss, dan Trapp (1985: 195-198), dalam merepresentasikan sosok perempuan menteri, media mengikuti aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang menunjukkan terjadinya formasi diskursif (pembentukan wacana). Aturan atau prosedur tersebut ialah: Pertama, aturan yang mengontrol fakta tentang sesuatu yang bisa dibicarakan. Inilah yang disebut dengan objek wacana. Dalam aturan ini terdapat juga aturan tentang larangan untuk membicarakan hal-hal tertentu. Kedua, siapa pihak yang diperbolehkan berbicara dan menulis. Dalam aturan ini ada syarat bahwa individu-individu yang berbicara harus mampu memenuhi subjek khusus, seperti memiliki kompetensi dan pengetahuan. Dan, ketiga, konsep-konsep dan teori-teori yang diterima sebagai pengetahuan dalam wacana. Ringkasnya adalah praktik-praktik dalam pembentukan wacana ini sangat ditentukan oleh objek-objek wacana, tipe-tipe pembicara tertentu, dan teori-teori atau konsep-konsep yang diasumsikan benar adanya.

Penutup

Wacana yang terdapat dalam rezim kebenaran yang dioperasionalkan media adalah patriarki. Dalam konteks ini, patriarki dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem sosial di mana perbedaan-perbedaan struktural memberi keistimewaan, kekuasaan, dan otoritas kepada maskulinitas.

Keuntungan lain yang diperoleh laki-laki adalah dalam bidang budaya, ekonomi, dan posisi-posisi sosial. Kaum perempuan dalam sistem ini disingkirkan dari kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas (Cranny-Francis, *et. al.*, 2003: 15). Wacana yang dikerahkan media dalam melaporkan keberadaan perempuan menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi berwatak patriarkis. Setidaknya, hal ini dapat dilihat pada: Pertama, objek yang dibicarakan adalah kalangan perempuan yang dipilih dalam jabatan politik sebagai menteri. Jika ada yang dianggap istimewa, maka perempuan menteri itu dicari titik-titik keunikan yang dimilikinya, dari sebutan "perempuan pertama" sampai "satu-satunya anggota Kabinet Kerja yang bertato". Kedua, pihak yang membicarakan (dalam kaitan ini yang membuat pemberitaan) adalah kaum laki-laki. Reporter atau suara jurnalis dari kalangan perempuan sengaja dibungkam. Dan, ketiga, konsep-konsep yang digunakan dalam membicarakan keberadaan kalangan perempuan menteri itu adalah bahasa yang menunjukkan hasrat untuk menaklukkan perempuan. Ada sanjungan terhadap aneka prestasi yang berhasil diraih kalangan perempuan menteri itu. Namun, di balik itu, terdapat pula kecemasan media terhadap perilaku dan kebertubuhan perempuan menteri tertentu yang dianggap berada di luar batas toleransi kuasa patriarki. Dus, kehendak patriarki menaklukkan perempuan semakin kuat.

Daftar Pustaka

- Bisnis.com* edisi Minggu, 26 Oktober 2014, 17:53 WIB. "Jadi Menteri BUMN, Ini Biografi Rini Soemarno".
- Bennett, Tony. "Media, 'Reality', Signification" dalam Michael Gurevitch, Tony Bennett, James Curran, dan Janet Woollacott, eds. (1990). *Culture, Society and the Media*. London dan New York: Routledge., hal. 287-308.
- Burns, Lynette Sheridan (2002). *Understanding Journalism*. New Delhi: Sage Publications.
- Cranny-Francis, Anne, *et. al.*, (2003). *Gender Studies: Terms and Debates*. New York: Palgrave Macmillan.
- Croteau, David dan William Hoynes (2000). *Media/Society: Industries, Images, and Audiences*. New Delhi: Pine Forge Press.
- Foss, Sonja K., Karen A. Foss, dan Robert Trapp (1985). *Contemporary Perspective on Rhetoric*. Illinois: Waveland Press.
- Foucault, Michel (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books.
- Hall, Stuart, "The Work of Representation" dalam Stuart Hall, ed. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. New Delhi: Sage Publications., hal. 15-63.

Triyono Lukmantoro

- Hartley, John (2002). *Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, Third Edition*. London dan New York: Routledge.
- Kompas.com* edisi Senin, 27 Oktober 2014 | 15:12 WIB. “Bisnis dan Gaya Eksentrik Susi Pudjiastuti”.
- Kompas.com* edisi Senin, 27 Oktober 2014 | 10:11 WIB. “Ini Alasan Khofifah Menangis Saat Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri”.
- Kompas.com* edisi Minggu, 26 Oktober 2014 | 19:37 WIB. “Jokowi: Ini Menteri Perempuan Pertama dari Papua”.
- Kompas.com* edisi Minggu, 26 Oktober 2014 | 18:56 WIB. “Profil Menteri Kesehatan Nita Djuwita Moeloek”.
- Kompas.com* edisi Minggu, 26 Oktober 2014 | 18:23 WIB. “Sekelumit Sosok Retno Marsudi, Menlu Perempuan Pertama Indonesia”.
- Koran Tempo* edisi Sabtu, 1 November 2014. “Susi Kecewa Ikan Indonesia Diolah Negara Lain”, hal. 1.
- Koran Tempo* edisi Kamis, 30 Oktober 2014. Foto Berita: Aksi Susi, hal. 2.
- Koran Tempo* edisi Kamis, 30 Oktober 2014. “Tentang Susi dari Desa Padasuka”, hal.5.
- Koran Tempo* edisi Rabu, 29 Oktober 2014. Kartun editorial, hal. 32.
- Majalah Detik* edisi 3-9 November 2014. “Hikayat Menteri Susi”.
- Mills, Sara (1997). *Discourse*. London dan New York: Routledge.
- Potter, Deborah (2006). *Handbook of Independent Journalism*. Bureau of International Information Programs U.S. Department of State.
- Republika.co.id* edisi Sunday, 26 October 2014, 21:12 WIB. “Setelah Mencapai Puncak Karier PNS, Siti Nurbaya Jadi Menteri: Profil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar”.
- Republika Online* edisi Selasa, 28 Oktober 2014, 16:31 WIB. “Puan Maharani Ingin Dipanggil ‘Ibu Menko’”.
- Schaefer, Richard T. (2007). *Sociology: Tenth Edition*. Toronto: McGraw-Hill.
- Webb, Jen (2009). *Understanding Representation*. London: Sage Publications.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Prof. Jeffrey Winters
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: "Status Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan" vii-viii

Artikel / Articles

- *Rekayasa Politik untuk Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan / Political Engineering for Women in Indonesian Governance* 257-264
Philips J. Vermonte
- *Kementerian Perempuan dalam Kerangka "National Women's Machinery": Kajian Reformasi Birokrasi / Women's Ministries in the Framework of National Women's Machinery: a Study of Reformative Bureaucracy* 265-270
Mariana Amiruddin
- *Genealogi Ratu Nusantara: Sejarah, Mitos & Politik Negara Modern / Nusantara Queen Genealogy: History, Myths and Modern State Politics*..... 271-277
Ryan Sugiarto
- *Kehendak Menakutkan! Kajian Representasi Media atas Perempuan Menteri dalam Kabinet Kerja / Will to Conquer! a Study of Media Representation of Female-Ministers in the 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet* 279-287
Triyono Lukmantoro
- *Profil, Status dan Kinerja Perempuan Kepala Daerah: Kajian Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung / Profiles, Statuses, and Achievements of Female Local Leaders: a Study of the Impact of Direct Local Election* 289-306
Kurniawati Hastuti Dewi
- *Infrastruktur, Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik / Infrastructure, Integrity, and Achievements of Female Local Leaders: a Perspective on Decentralization Politics*..... 307-315
Robert Endi Jaweng
- *Raison d'être Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan / Raison d'être of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance*..... 317-326
Dewi Candraningrum

Wawancara / Interview

- *Nafsiah Mboi: "Sikap Tegas Perlu, Tetapi Penguasaan Materi Juga Penting" / Nafsiah Mboi: "Assertiveness is necessary but competence is also crucial"* 327-332
Anita Dhewy

Kata dan Makna / Words and Meanings..... 333-334

Profil / Profile

- *Yohana Yembise: Perempuan Punya Peran Meningkatkan Ekonomi Keluarga / Yohana Yembise: Women have significant roles in increasing family's incomes"* 335-339
Anita Dhewy

Resensi Buku/ Book Review

- *Bagaimana Linda Gumelar Memimpin Kementerian? / How Linda Gumelar leads the Ministry?* 341-343
Nadya Karima Melati

